

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Dan Lokasi Objek Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Desa Pandangan Wetan yang memiliki luas 56.746 Ha, dengan ketinggian 1-2 m dari permukaan laut dan desa ini terletak sekitar 30 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa  
 Sebelah Selatan : Desa Sumber Gayam  
 Sebelah Timur : Desa Plawangan  
 Sebelah Barat : Desa Pandangan Kulon

Dengan rincian tata guna lahan sebagai berikut :

- 1) Lahan Darat
  - a. Tanah Makam : 0,45 Ha
  - b. Tanah Negara : 1 Ha
  - c. Tanah milik Desa : 16,9 Ha
  - d. Tanah Wakaf : 0,14 Ha
  - e. Tanah Jalan : 0,32 Km
  - f. Tanah Milik Masyarakat : 33,096 Ha
- 2) Lahan Sawah dan ladang : Ha
- 3) Lahan Kolam : - Ha

#### 2. Demografi

Jumlah penduduk di wilayah Desa Pandangan Wetan sampai akhir Desember 2021 3.272 orang yang terdiri dari laki-laki 1.660 orang dan perempuan 1.612 orang, jumlah penduduk tersebut berdasarkan kelompok sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Desa Pandangan Wetan sampai dengan bulan Desember 2021

Jumlah Laki-Laki (Orang)	1.660
Jumlah Perempuan (Orang)	1.612
Jumlah Total (Orang)	3.272
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.129

#### **Bagan 1.1 Jumlah Penduduk Desa Pandangan Wetan**

- b. Jumlah penduduk menurut agama/penghayat terhadap Tuhan YME

- a. Islam : 3.302 orang
  - b. Kristen : 19 orang
  - c. Khatolik : 22 orang
  - d. Hindu : -
  - e. Budha : 68 orang
  - f. Kepercayaan terhadap Tuhan YME: 17 orang
  - g. Tidak Beragama : - orang
- c. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok Umur :

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
1	00 s/d 06 tahun	173	139
2	07s/d12 tahun	155	134
3	13s/d18 tahun	154	127
4	19s/d25 tahun	161	172
5	26s/d40 tahun	398	327
6	41 s/d 60 tahun	430	529
7	61s/d75 tahun	159	160
8	76tahun keatas	24	30
	Jumlah Laki-laki (orang)	1.654	-
	Jumlah Perempuan (orang)	-	1.618

**Bagan 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

- d. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok Angkatan Kerja :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	10 s/d 14 Tahun	0 Orang
2	15 s/d 19 Tahun	116 Orang
3	20 s/d 26 Tahun	252 Orang
4	27 s/d 40 Tahun	472 Orang
5	41 s/d 56 Tahun	590 Orang
6	57 Tahun Keatas	340 Orang

**Bagan 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja**

- e. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	SD	1.158
2	SLTP	576
3	SLTA	486

4	D1,D2,D3	47
5	S1	118
6	S2	4

**Bagan 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

f. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Peagawai Negeri Sipil	23
	TNI dan POLRI	10
	Pegawai swasta (BUMN/BUMD)	2
	Pamong Desa	8
	Pedagang	44
	Buruh Tani	2
	Nelayan	620
	Petani	2
	Wiraswasta	619
	TKI	96
	Guru	25
	Perawat	7
	Bidan	3
	Dokter	1
	Pensiunan	13

**Bagan 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Secara administratif Desa Pandangan Wetan dibagi menjadi 5Rukun Warga (RW) Dan 16 Rukun Tetangga (RT).Adapun rinciannya sebagai berikut

- 1) Rukun Warga (RW 1): 3 RT (RT 1,2,3)
- 2) Rukun Warga (RW 2): 4 RT (RT 4,5,6,7)
- 3) Rukun Warga (RW 3): 3 RT (RT 8,9,10)
- 4) Rukun Warga (RW 4): 3 RT (RT 11,12,13)

5) RukunWarga (RW 5) : 3 RT (RT 14,15,16)<sup>1</sup>

### 3. Sejarah Desa

Sejarah Desa Pandangan Wetan secara pasti tidak diketahui,hanya sedikit hasil wawancara dengan beberapa sesepuh Desa Pandangan Wetan,adalah sebagai berikut :

Jaman penjajahan belanda Desa Pandangan Wetan sudah ada bahkan konon Desa Pandangan Wetan adalah Desa yang sangat ramai menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari desa-desa sekitarnya,bahkan pedagang dan pembeli datang dari Kecamatan lain seperti Kecamatan Sluke, Sarang, Sedan dan Lasem, maka tempat tersebut menjadi Pasar Pandangan yang sekarang pindah di Desa Plawangan.

Desa Pandangan yang dulu adalah tempat yang sangat luas hingga awal kemerdekaan Indonesia. Untuk mempermudah pengaturannya di bagi menjadi 2 (Dua) wilayah yaitu Wilayah Timur menjadi Desa Pandangan Wetan dan Wilayah Barat menjadi Desa Pandangan Kulon.Hanya itu yang dapat dituangkan dalam sejarah Desa Pandangan Wetan.<sup>2</sup>

### 4. Visi dan Misi Desa

a. Visi Desa Pandangan Wetan, sebagai berikut :

“ Mewujudkan Masyarakat Bertaqwa, Maju, Mandiri, Sejahtera,

1) Taqwa bermakna mampu memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntutan /petunjuk Yang Maha Esa.

2) Maju bermakna mampu menerapkan prinsip kemandirian .

3) Mandiri bermakna mampu menerapkan prinsip kemandirian.

4) Sejahtera bermakna mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang

---

<sup>1</sup> Arsip dokumen desa pandangan wetan, di ambil pada 10 februari 2022

<sup>2</sup> Arsip dokumen desa pandangan wetan, di ambil pada 10 februari 2022

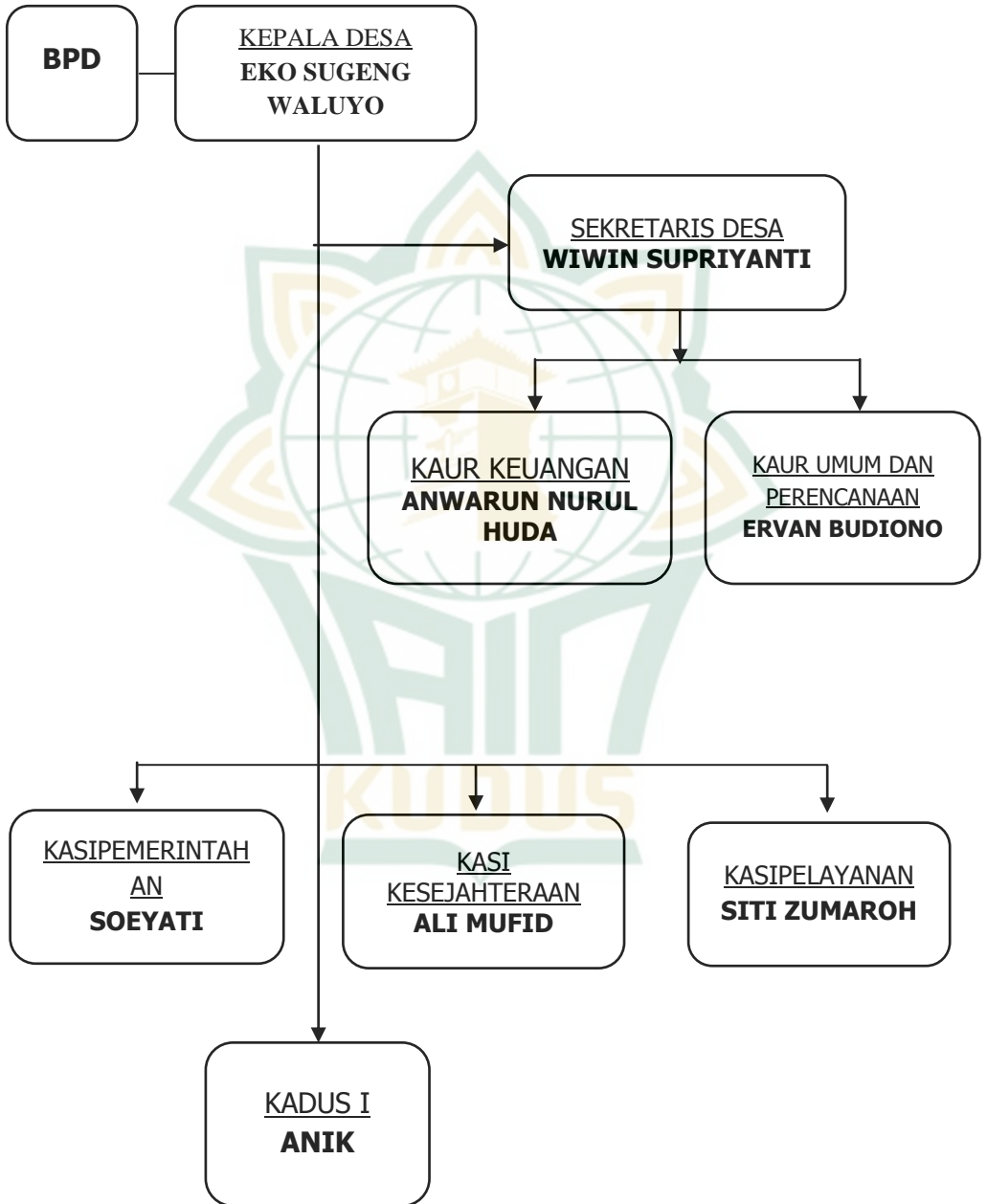
mencakup aspek social budaya ,ekonomi dan fisik.

- 5) Gotong royong bermakna saling membantu dan menggerakkan semua komponen agar terpadu dan sejalan
- b. Misi Desa Pandangan Wetan, Sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan persatuan, kesatuan dan nasionalisme dalam kerangka keluarga besar Pandangan Wetan
  - 2) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang di anut dan budaya bangsa sehingga menjadi kearifan dalam bertindak
  - 3) Mewujudkan sikap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat
  - 4) Mengupayakan terjaminnya kesejahteraan masyarakat
  - 5) Memberikan rasa aman di lingkungan warga masyarakat
  - 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
  - 7) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, tanggung jawab dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - 8) Mengupayakan pembangunan infrastruktur (saluran air, tempat sampah, dan lain sebagainya)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Arsip dokumen desa pandangan wetan, di ambil pada 10 februari 2022

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**



## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Deskripsi program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

PKH merupakan Program yang di keluarkan pemerintah dalam meringankan kemiskinan pada masyarakat, program ini di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat mencakup kondisi sosial dan ekonomi. Seperti halnya penjelasan dari Ibu Asih pendamping PKH Desa Pandangan Wetan, dimana beliau menjelaskan bahwa secara umum PKH untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Penerima Manfaat (KPM).<sup>4</sup>

Beliau juga menegaskan bahwa Setiap sebulan tim PKH Kecamatan mengadakan (FDS) *family developmen sesion* atau (P2K2) Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Hal ini ditujukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program pemerintah dalam mencetak keluarga harapan. Selain itu pertemuan ini juga di manfaatkan tim PKH Kecamatan dalam mengawal perkembangan masyarakat dari segi kesejahteraan, serta di jadikan sebagai kontroling terhadap penerima atau yang memanfaatkan program PKH di Desa Pandangan Wetan.

Pada pelaksanaan program PKH penentuan data penerima sudah dari pusat, bersumber dari (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan sosial. Kemudian di terima pendamping dan konsultasi di Balai Desa untuk cek validasi sudah sesuai apa belum, setelah itu di cek kelapangan langsung. Koordinasi dengan desa agar tepat sasaran. Hal ini dilakukan oleh tim kecamatan bekerjasama dengan Pemerintahan Desa Pandangan wetan untuk meningkatkan efektivitas program PKH, juga untuk menentukan target sasaran yang tepat

---

<sup>4</sup>Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022. Wawancara 3, Transkrip.

sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu kontribusi Pemerintahan desa dalam hal ini bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat melihat bahwa program-program semacam ini sangat riskan sekali salah sasaran dan memancing iri hati masyarakat lain padahal mereka bukan merupakan masyarakat yang layak atau pantas menerima bantuan PKH.

Hal tersebut juga diperkuat dengan apa yang disampaikan Kepala Desa Pandangan Wetan, bahwa program PKH merupakan program untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu berdasarkan aspek tertentu berdasarkan undang-undang untuk menciptakan keluarga harapan sehingga meminimalisir masyarakat tidak mampu yang keterlaluhan (tidak bisa makan, tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa beli susu). Untuk regulasi PKH di desa berdasarkan yang dikatakan Ibu Sekertaris Desa bahwa di Desa Pandangan Wetan data masyarakat kategori layak mendapatkan PKH di ambil atau bekerjasama dengan ketua RT Desa Pandangan Wetan untuk di cek kembali oleh perangkat desa (sesuai porsi). Selanjutnya data diajukan ke tim PKH Kecamatan untuk di olah kembali, di cek tingkat kelayakan untuk kemudian akan di tentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan program PKH di Desa Pandangan Wetan sudah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya hubungan yang baik antar lapisan yang terlibat dalam proses pelaksanaan program PKH di Desa Pandangan Wetan. Selain itu program ini merupakan program yang baik dalam usaha meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Eko sugeng waluyo, wawancara dengan penulis pada 11 Februari, 2022. Wawancara 1, Transkrip.



## 2. Deskripsi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kragan Kabupaten Rembang

Implementasi program keluarga harapan (PKH) terlaksana dengan baik serta terbukti membantu masyarakat kurang mampu, yang memanfaatkan program ini. Seperti halnya penjelasan dari Ibu Jum'atin bahwa beliau sangat senang dengan adanya program PKH karena mampu membantu beliau dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras,minyak,telur,ikan). Selain itu bantuan PKH juga berupa bantuan uang tunai yang mampu meringankan beban beliau dalam membiayai sekolah anak dan keperluan sehari-hari. Penjelasan ibu jum'atin sesuai dengan tujuan serta kriteria dari penerima PKH seperti penjelasan tim PKH Kecamatan bahwa untuk Desa Pandangan Wetan penerima bantuan pkh kebanyakan memiliki anak sekolah, sd smp sma. Istri hamil, anak balita yang usia dini, lansia dan distabilitas.

Pada implementasinya, program PKH di masyarakat khususnya di Desa Pandangan Wetan, tidak hanya asal membagikan bantuan atau sembako, uang tunai kepada masyarakat. Namun juga mengadakan pendampingan guna kontroling pemanfaatan dana serta pengembangan masyarakat penerima bantuan PKH untuk mewujudkan terciptanya keluarga harapan. Salah satu contohnya adalah dengan di adakannya kegiatan FDS dan P2K2 dalam kegiatan tersebut pendamping sebagai pemateri, menyiapkan materi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan ungkapan dari Kepala Desa bahwa program dari tim PKH Kecamatan (FDS,P2K2) sangat mendapatkan apresiasai yang baik dari masyarakat juga dari pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut program PKH di tinjau dari proses impelemntasinya di terima dengan baik oleh masyarakat khususnya penerima bantuan PKH. Namun program ini juga memliki beberapa poin

permasalahan seperti munculnya beberapa rasa iri dari beberapa oknum masyarakat yang merasa dirinya layak mendapatkan PKH tapi tidak mendapatkan bantuan. Wujud atau bentuk dari permasalahan ini biasanya adanya keluhan dari oknum masyarakat kepada tim PKH Kecamatan. Untuk mengatasi permasalahan ini tim PKH Kecamatan berusaha sebijak mungkin untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui bekerjasama dengan pemerintahan Desa Pandangan Wetan. Tim PKH Kecamatan mengaku bahwa mereka menerima keluhan tersebut, kemudian menghimbau kepada masyarakat sekitar dan menjelaskan bagaimana proses penerimaan PKH, yang jelas harus terdata di DTKS. Jika tidak paham DTKS di anjurkan ke Balai Desa dan di cek data penerima.

### **3. Deskripsi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang**

Edward III dalam Subarsono, A. G. menegaskan bahwa masalah *utama* administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *beureucratic structures*. Edward menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan. variabel tersebut antara lain :

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

## 2. Sumber Daya

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

## 3. Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>6</sup>

Setiap program dalam tujuannya dilaksanakan serta proses pengimplementasiannya diharapkan

---

<sup>6</sup> A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi* (Makassar: Pustaka belajar, 2012), 19.

berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran suatu program diadakan atau dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya suatu program tentunya terdapat faktor pendorong dan penghambat didalamnya. Sepertinya halnya program keluarga harapan (PKH) di Desa Pandangan Wetan memiliki faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya.

a. Faktor pendorong

1) Kinerja positif tim pkh kecamatan

Pelaksanaan PKH di Desa Pandangan Wetan tentunya tidak terlepas dari peran tim PKH Kecamatan. Tim PKH Kecamatan merupakan poin penting dalam program ini terkait implementasinya serta efektivitasnya di masyarakat Desa Pandangan Wetan. Kinerja positif tim PKH Kecamatan terbukti mampu menciptakan ketenangan, keadilan, pendistribusian dana PKH dengan tepat sasaran.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kinerja positif tim PKH Kecamatan merupakan salah satu pendorong dari pelaksanaan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat.

2) Dukungan dan penerimaan yang baik masyarakat Desa Pandangan Wetan

Masyarakat kurang mampu sesuai dengan undang-undang penerima PKH merupakan objek dari program PKH ini. Dapat di artikan respon positif yang muncul merupakan bukti kesuksesan dari program PKH di Desa Pandangan Wetan. Dimana KPM, selalu aktif untuk datang dalam kegiatan yang diadakan oleh tim PKH merupakan manifestasi dari respon positif masyarakat Desa Pandangan Wetan

---

<sup>7</sup> Observasi di desa pandangan wetan pada tanggal 10 Februari 2022

. selain itu program PKH secara langsung berdasarkan informasi Masyarakat dalam segi finansial dapat membayar sekolah anak, KPM dapat terbantu untuk membayar sehingga tidak menunggak.

3) Suport dan tanggapan positif dari Pemerintahan Desa Pandangan Wetan

Dari sisi Pemerintah Desa memiliki respon positif kepada pendamping sehingga mampu meningkatkan semangat pendamping dalam proses pelaksanaan program di Desa Pandangan Wetan. Hal ini di latarbelakangi dampak positif dari program PKH contohnya dalam segi kesejahteraan, Setiap lansia mendapatkan pemeriksaan secara rutin, dalam garis besar perkembangannya sudah bagus, dari segi ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosial. di buktikan adanya kesadaran dari KPM untuk melakukan hal lebih baik dari sebelumnya.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini faktor pendorong di bedakan menjadi dua, yaitu:

1) Faktor pendorong primer

Kinerja yang baik Pendamping PKH Kecamatan, berperan penting dalam pelaksanaan PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pandangan Wetan,

2) Faktor pendorong sekunder

Adanya respon yang sangat baik dari masyarakat dan antusias keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mengikuti kegiatan yang di adakan pendamping PKH Kecamatan, support dan tanggapan yang baik dari

---

<sup>8</sup> Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022. Wawancara 3, Transkrip.

pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berjalan dengan baik.

b. Faktor penghambat

1) Padatnya jadwal tim PKH Kecamatan

Pelaksanaan PKH di Desa Pandangan Wetan tentunya tidak terlepas dari peran tim PKH Kecamatan. Tim PKH Kecamatan merupakan poin penting dalam program ini terkait implementasinya serta efektivitasnya di masyarakat Desa Pandangan Wetan. Namun tim PKH Kecamatan tentunya tidak hanya berfokus pada program PKH di Desa Pandangan Wetan saja sehingga terpecahnya fokus di karenakan jadwal di Desa lain, serta juga kesibukan tim PKH Kecamatan secara individu menjadikan munculnya beberapa persepsi negatif dari beberapa oknum.<sup>9</sup> Hal ini menjadikan padatnya dari tim PKH Kecamatan sebagai faktor penghambat pelaksanaan program PKH dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

2) Persepsi negatif beberapa oknum masyarakat Desa Pandangan Wetan

Masyarakat merupakan salah satu kelompok besar dimana didalamnya tidak hanya terdapat individu dengan pemikiran yang sama melainkan beragam pemikiran, karakter dan sifat. Hal ini juga terlihat dari beberapa respon masyarakat terhadap program PKH ada yang menanggapi positif, ada yang tidak menerima dengan melakukan protes. Ada KPM yg sudah mampu namun tidak mengundurkan diri.

---

<sup>9</sup>Observasi di desa pandangan wetan pada tanggal 10 Februari 2022

Masyarakat sekitar yang mengetahui nantinya akan protes.<sup>10</sup>

- 3) Kebingungan pemerintahan desa dengan penentuan penerima bantuan PKH di Desa Pandnagn Wetan

Program PKH dalam pelaksanaannya memiliki ketentuan dan regulasi yang membutuhkan pemahaman serta koordinasi yang baik antar beberapa lapisan terkait (tim PKH Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat) di Desa Pandangan Wetan. Namun ada beberapa poin yang menjadikan pemerintah desa acap kali merasa kebingungan dalam beberapa langkah pengambilan keputusan terkait undang-undang PKH dan juga sikap masyarakat. Manifestasi dari hal tersebut adalah masih munculkan protes dari beberapa masyarakat terhadap penentuan KPM.<sup>11</sup> Pemerintahan desa kurang mengerti regulasi PKH dan hanya mengikuti arahan dari tim PKH Kecamatan.<sup>12</sup>

### C. Analisis Penelitian

1. Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Sejak tahun 2007 Pemerintahan Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program serupa telah di laksanakan dan cukup berhasil di beberapa Negara yang di kenal dengan

---

<sup>10</sup> Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022. Wawancara 3, Transkrip.

<sup>11</sup> Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022. Wawancara 3, Transkrip.

<sup>12</sup> Observasi di desa pandangan wetan pada tanggal 10 Februari 2022

Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan di lebih maksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan social kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Namun tujuan PKH untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri merupakan harapan jangka panjang yang ingin dicapai.<sup>13</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.<sup>14</sup>

Hal tersebut merupakan salah satu program pemerintah yang di nanti dan diharapkan oleh masyarakat. Seperti halnya warga Desa Pandangan Wetan. Warga memiliki antusias dan harapan yang sangat tinggi terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena program ini memiliki tingkat efek yang praktis di masyarakat. Hal ini yang menjadi warga Dsa Pandangan Wetan memiliki harapan tinggi untuk terpilih menjadi peminfaat program tersebut. Namun harapan yang tinggi di masyarakat acap kali memunculkan rasa iri dari warga lain yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut acap

---

<sup>13</sup>Adi sanjaya, dkk., "Program Keluarga Harapan (PKH) antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan," *Ejournal Riset & PKM* 4, no. 1(2016): 27.

<sup>14</sup>Rosmiati, dkk, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, (NA: KEMINFO RI, 2015), 18..



kali memunculkan komentar dari masyarakat kepada pelaksana program PKH.

Menurut Kementerian Sosial tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka waktu panjang.<sup>15</sup> Berdasarkan keterangan di atas tujuan umum dari PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga memutus rantai kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu di tentukanlah sasaran penerima program keluarga harapan (PKH). Sasaran penerima Program Keluarga Harapan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu:

- a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita
- b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah)
- c. Anak SD/MI (usia 7-12 tahun)
- d. Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun)
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH dikatakan bahwa, sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan fakir miskin, yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>16</sup> Jadi keluarga yang termasuk kategori rumah tangga miskin dan keluarga sangat miskin yaitu harus memenuhi kriteria

---

<sup>15</sup>[www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id) (diakses Selasa, 17 Januari, 2022, 12:45 WIB).

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Sosial RI, “1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan,” (08 Januari 2018).

tersebut dan berhak menerima program keluarga harapan.

Penentuan sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan diharapkan mampu menjadi penentu guna terciptanya program yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu disinilah point dimana Petugas PKH dibutuhkan sebagai pelaksana juga controlling serta pengembangan pada penerima manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti halnya di Desa Pandangan Wetan yang merupakan salah satu wilayah yang memanfaatkan program PKH ini. Dimana di Desa Pandangan Wetan terdapat 186 Keluarga yang menjada penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana diharapkan bahwa dengan program ini akan tercipta kesejahteraan di Masyarakat. Seperti halnya penjelasan dari Ibu Asih pendamping PKH Desa Pandangan Wetan, dimana beliau menjelaskan bahwa secara umum PKH untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Penerima Manfaat (KPM).<sup>17</sup> 186 KK ini diambil dari kelompok keluarga yang tidak mampu, seperti halnya janda, keluarga buruh tani, juga ada keluarga yang memiliki anak sekolah yang memang membutuhkan bantuan.

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa PAndangan Wetan, dilaksanakan oleh tim PKH Kecamatan Kragan di bantu dengan pemerintahan Desa terkait penentuan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Namun peran tim pelaksana atau tim PKH Kecamatan tidak hanya itu mereka juga melaksanakan program pengembangan dan penjelasan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PKH juga memberikan wawasan untuk terciptanya keluarga harapan. Ibu Asih juga menambahkan bahwa Setiap sebulan tim PKH Kecamatan mengadakan (FDS)*family developmen sesion*atau(P2K2) Pertemuan peningkatan kemampuan

---

<sup>17</sup> Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022.  
Wawancara 3, Transkrip.

keluarga. Hal ini ditujukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program pemerintah dalam mencetak keluarga harapan.<sup>18</sup>

2. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kragan Kabupaten Rembang

Menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran dari hasil yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Mengimplementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>19</sup>

Seperti halnya pada penelitian terkait Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dsa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Di mana terjadi fenomena program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Program ini memiliki

---

<sup>18</sup> Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022. Wawancara 3, Transkrip.

<sup>19</sup>Andi Cahyadi, dkk., “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal Kependudukan* 6, no. 1 (2018): 3.

proses pengimplementasian yang membutuhkan banyak pihak dan juga pengawasan di dalamnya. Salah satunya adalah proses penentuan kelompok penerima manfaat (KPM) serta proses pendistribusian dana. Hal ini dikarenakan program ini merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat melalui terciptanya keluarga harapan. Kebijakan ini merupakan bentuk bantuan kepada kelompok keluarga sesuai dengan ketentuan.

Seperti halnya menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>20</sup>

Anderson menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu, siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakanEfek atau dampak dari implementasi. Seperti halnya program Keluarga Harapan ( PKH) yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah melalui Kemensos, yang salah satunya dinikmati oleh beberapa masyarakat Desa Pandangan Wetan, Kragan. Dimana meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Hessel Nogi, *Kebijakan Publik yang Membumi* (Yogyakarta: Lukman Offset, 2013), 2.

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi Program PKH di Desa Pandangan Wetan dilaksanakan sesuai dengan melibatkan Tim PKH dari Kecamatan, Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Desa Pandangan Wetan
2. Hakikat proses administrasi  
Proses administrasi dilaksanakan dengan diawali dari surat edaran dari Tim PKH kepada Pemerintahan Desa, untuk selanjutnya dilaksanakan proses penentuan calon penerima manfaat yang dibantu oleh sub terkecil dari pemerintahan Desa yaitu RT, data yang diajukan oleh masing-masing RT kemudian di kumpulkan di tingkat Desa untuk diserahkan kepada tim PKH dari Kecamatan untuk Kemudian di laksanakan penentuan ulang calon penerima Bantuan PKH. Selanjutnya tim PKH menyerahkan data resmi penerima bantuan PKH ke Kepala Desa untuk di umumkan siapa saja yang terpilih menjadi penerima manfaat PKH. Selaras dengan apa yang dikatakan Ibu Carik bahwa di Desa Pandangan Wetan data masyarakat kategori layak mendapatkan PKH di ambil atau bekerjasama dengan ketua RT Desa Pandangan Wetan untuk di cek kembali oleh perangkat desa (sesuai porsi). Selanjutnya data diajukan ke tim PKH Kecamatan untuk di olah kembali, di cek tingkat kelayakan untuk kemudian akan di tentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH.<sup>21</sup>
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan  
Kebijakan ini di dasari pada suatu kebijakan pemerintah melalui kemensos yang diatur dalam UU yaitu:
  - 1) Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

---

<sup>21</sup> Observasi di desa pandangan wetan pada tanggal 10 Februari 2022

- 2) Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 3) Keputusan Menteri Sosial RI No. 29 tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelayanan Sumberdaya Manusia.
- 4) Keputusan Menteri Sosial RI No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 tanggal 08 januari 2008.<sup>22</sup>

4. Efek atau dampak dari implementasi.

Efek atau dampak dari Implementasi Program PKH di Desa Pandngan Wetan adalah secara praktis mampu meringankan beban masyarakat penerima manfaat, seperti meringankan biaya sekolah anak, pemenuhan gizi, dan juga menambah wawasan masyarakat terkait bagaimana menjadi keluarga yang sejahtera.

3. Analisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Setiap program dalam tujuannya dilaksanakan serta proses pengimplementasiaanya diharapkan berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran suatu program diadakan atau dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya suatu program tentunya terdapat faktor pendorong dan penghambat didalamnya. Sepertinya halnya program keluarga harapan (PKH) di Desa Pandangan Wetan memiliki faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya.

a. Faktor pendorong

- 1) Kinerja positif tim pkh kecamatan

---

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Sosial RI, “1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan,” (08 Januari 2018).

Peran tim Pendamping PKH kecamatan dalam pelaksanaan PKH di Desa Pandangan Wetan sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari implementasinya serta efektivitasnya di masyarakat Desa Pandangan Wetan. Di buktikan dengan kinerja positif tim PKH Kecamatan mampu menciptakan ketenangan, keadilan, pendistribusian dana PKH dengan tepat sasaran.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kinerja positif tim PKH Kecamatan merupakan salah satu pendorong dari pelaksanaan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat.

2) Dukungan dan penerimaan yang baik masyarakat Desa Pandangan Wetan

Dalam Penerimaan program Keluarga Harapan (PKH) yaitu masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan undang-undang. Respon positif dari kalangan masyarakat merupakan bukti kesuksesan dari program PKH di Desa Pandangan Wetan. Di buktikan dengan keaktifan KPM dalam mengikuti kegiatan yang di adakan oleh tim PKH merupakan manifestasi dari respon positif masyarakat Desa Pandangan Wetan. Berdasarkan informasi dari masyarakat program PKH dalam segi finansial dapat membayar sekolah anak, KPM dapat terbantu untuk membayar sehingga tidak menunggak.

3) Suport dan tanggapan positif dari Pemerintahan Desa Pandangan Wetan

Pemerintah Desa dalam merespon tim pendamping PKH Kecamatan sangat baik. Sehingga mampu meningkatkan semangat pendamping dalam proses pelaksanaan program di Desa Pandangan Wetan. Hal ini

---

<sup>23</sup> Observasi di desa pandangan wetan pada tanggal 10 Februari 2022

di latarbelakangi dampak positif dari program PKH contohnya dalam segi kesejahteraan, Setiap lansia mendapatkan pemeriksaan secara rutin, dalam garis besar perkembangannya sudah bagus, dari segi ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosial. di buktikan adanya kesadaran dari KPM untuk melakukan hal lebih baik dari sebelumnya.<sup>24</sup>

b. Faktor penghambat

1) Padatnya jadwal tim PKH Kecamatan

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Pandangan Wetan tentunya tidak terlepas dari peran tim PKH Kecamatan. Tim PKH Kecamatan merupakan poin penting dalam program ini terkait implementasinya serta efektivitasnya di masyarakat Desa Pandangan Wetan. Namun fokus tim PKH Kecamatan tentunya tidak hanya pada program PKH di Desa Pandangan Wetan saja, karena terdapat jadwal di desa lain. Serta juga kesibukan dari tim PKH Kecamatan secara individu menjadikan munculnya beberapa persepsi negatif dari beberapa oknum.<sup>25</sup> Hal ini di sebabkan padatnya jadwal dari tim PKH Kecamatan sebagai faktor penghambat pelaksanaan program PKH dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

2) Persepsi negartif beberapa oknum masyarakat Desa Pandangan Wetan

Masyarakat merupakan salah satu kelompok besar yang tidak hanya memiliki pemikiran yang sama, tetapi juga memiliki

---

<sup>24</sup> Eko Sugeng Waluyo, wawancara dengan penulis pada 11 Februari, 2022. Wawancara 1, Transkrip.

<sup>25</sup> Observasi di desa pandangan wetan pada tanggal 10 Februari 2022



beragam pemikiran, karakter dan sifat yang berbeda. Hal ini di buktikan dengan adanya respon positif dan ada yang tidak menerima dengan melakukan protes. Ada KPM yg sudah mampu namun tidak mengundurkan diri, hali ini menyebabkan protes dari Masyarakat sekitar yang mengetahuinya.<sup>26</sup>

3) Kebingungan pemerintahan desa dengan penentuan penerima bantuan PKH di Desa Pandnagn Wetan

Dalam pelaksanaan Program PKH memiliki ketentuan dan regulasi yang membutuhkan pemahaman serta koordinasi yang baik antar beberapa lapisan terkait (tim PKH Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat) di Desa Pandangan Wetan. Namun pemerintah Desa acap kali merasa kebingungan dalam beberapa pengambilan keputusan terkait undang-undang PKH dan juga skap masyarakat. Manifestasi dari hal tersebut yaitu adanya munculnya protes dari beberapa masyarakat terhadap penentuan KPM.<sup>27</sup> Pemerintahan desa kurang mengerti regulasi PKH dan hanya mengikuti arahan dari tim PKH Kecamatan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022.  
Wawancara 3, Transkrip.

<sup>27</sup> Asih, wawancara dengan penulis pada 12 Februari, 2022.  
Wawancara 3, Transkrip.

<sup>28</sup> Observasi di desa pandangan wetan pada tanggal 10 Februari  
2022